

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Sebagai hasil dari studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah dalam pelaksanaannya belum tercapai semaksimal mungkin sebagaimana yang diharapkan. Pada dasarnya Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Kemudian meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 meliputi dengan menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Kendala yang dihadapi ada kesenjangan antara waktu yang dihabiskan untuk pengelolaan sampah. Jika bangunan berada di jalan sempit,

pembatasan khusus pengumpulan sampah menyulitkan untuk masuk. Selain itu, hambatan lain, seperti kekurangan staf, mempengaruhi pelaksanaan program. Selain itu, ada kekurangan orang, sumber daya yang terbatas dan kemampuan untuk mengimplementasikan program. Keterlibatan masyarakat diperlukan dalam pengelolaan sampah dan klasifikasi sampah rumah tangga. Sampah dapat didaur ulang dengan memilah dan mengubah sampah tidak beracun menjadi jenis lain yang memiliki manfaat ekonomi dan briket. Pemantauan berkala oleh pihak yang berwenang diperlukan untuk memeriksa efektivitas sampah di masyarakat. Berbagai kendala yang dihadapi seperti kurangnya mobilitas pengangkut sampah, sumber daya manusia serta peran masyarakat yang kurang perhatian terhadap pengelolaan sampah.

5.2. Saran

Pelaksanaan rencana tersebut sangat konstitusional, namun masih banyak yang harus dilakukan, sehingga perlu peningkatan kerja semua pihak agar rencana tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jika memungkinkan, penting untuk berbicara dengan komunitas yang terlibat. Semua pihak yang terlibat dalam program ini bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah dalam rangka pencegahan pencemaran. Hal ini mendorong masyarakat untuk gotong royong, membayar timah dan denda kepada yang membuangnya, namun strategi ini tidak berhasil karena masih banyak sampah di lingkungan. Permasalahan pengelolaan sampah masih kecil di masyarakat karena kurangnya inovasi dalam pemanfaatan atau daur ulang sampah serta lemahnya masyarakat

dalam bekerjasama dengan masyarakat. Menghargai upaya pemerintah dan otoritas sanitasi untuk mengatasi masalah sampah Batam.

Kesetaraan peran politisi dan masyarakat dalam mencapai kesetaraan dalam pendidikan dan pengelolaan sampah. Pemerintah kelurahan Battambang harus benar-benar mematuhi aturan dan inovasi untuk mendapatkan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan efisien. Melaksanakan program pengelolaan sampah kesehatan untuk menginformasikan kepada masyarakat.